

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim., Icku Rangga Bawono., & Amin Dara. 2018. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Bone Dalam Angka. Watampone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. 2020. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 290-298.
- Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo
- Syaidar, Herwin. 2020. *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone*
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Juliarni, Aniek dan Tatan Jaka Tresnajaya. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta*
- Kesek, Freisly. 2013. *Efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*
- Degei, Kristianus. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua*
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. 2018. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIM YKPN
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik edisi ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoeseobroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-UG

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Masitoh, S. 2018. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto)
- Mahsun, M. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Nurlaelah, N., & Hapsari, R. P. D. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 7(3).
- Phaureula, A.W. dan Emy, I. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Pradita, F. D. 2014. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rini, W., dan Astuti S. 2021. *Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(6), 1209-1219
- Septriana, Ochi. 2013. *Materi Kuliah Pengantar Bisnis*, (Online), (<http://materikuliahpengantarbisnis.blogspot.co.id>), diakses 24 maret 2022)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. 2019. Efektivitas pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodmica*, 3(2).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Asmaniar
Tempat, Tanggal Lahir : Balubu, 3 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Wesabbe, Dyandara Residence Blok B6
No Telp : 081340144543
Email : asmaniar50@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

- b. Pendidikan Formal
 - a. SDN 145 Mattirowalie (2006-2012)
 - b. SMPN 2 Lappariaja (2012-2015)
 - c. SMAN 5 Bone (2015-2018)
 - d. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin
- c. Pendidikan Non Formal/Training/Seminar
 - a. Pelatihan Basic Learning Skill, Character, and Creativity (BALANCE) (2018)
 - b. Bina Kader Mahasiswa Akuntansi (BKMA) oleh Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2018)

Makassar, 8 November 2022

Asmaniar

LAMPIRAN 2: Surat Keterangan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.891/VIII/IP/DPMPSTP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ASMANIAR**
NIP/Nim/Nomor Pokok : A031181034
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Mattiro Walie Kec. Bengo
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE”

Lamanya Penelitian : 05 Agustus 2022 s/d 04 September 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 05 Agustus 2022

PIT. KEPALA DINAS,

Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19760307 199511 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Arsip.



LAMPIRAN 3: Surat Keterangan Penelitian Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jln W.R. Monginsidi No. 5 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92713 Tlp (0481) 21106 Fax (0481) 21106

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/318/IX/BAPENDA

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor : 070/12.891/VIII/IP/DPMTSP/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penulisan Skripsi An. **ASMANIAR** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANDI MUSLAM, S.Sos, MM
N I P : 19680605 199103 1 019
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Bapenda Kab. Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : ASMANIAR
N I M : A031181034
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin
Alamat : Desa Mattiro Walie Kec. Bengo

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul :

**“ ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 05 Agustus 2022 s/d 04 September 2022

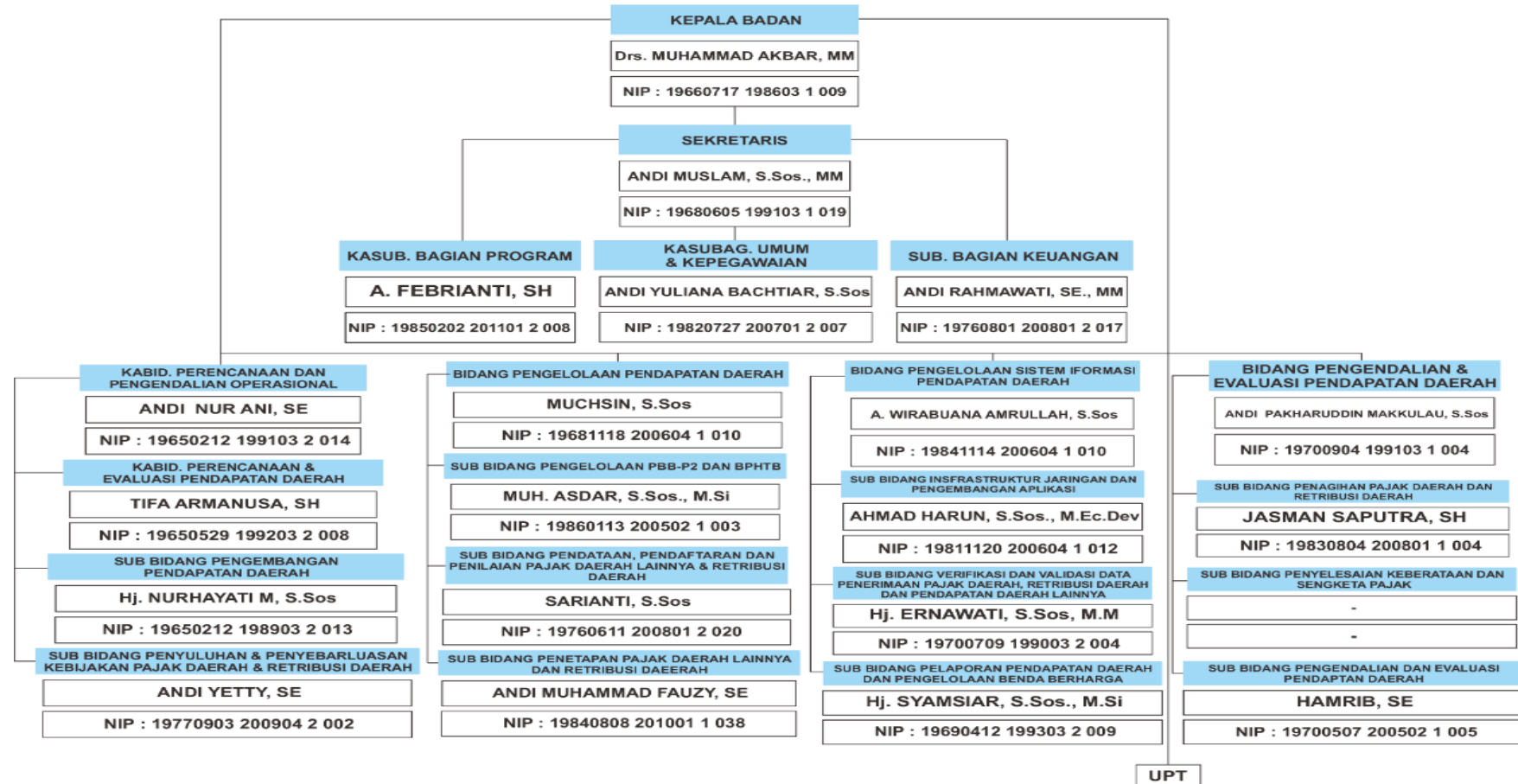
Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 05 September 2022

An. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Sekretaris

ANDI MUSLAM, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19680605 199103 1 019

LAMPIRAN 4: Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bone



LAMPIRAN 5: Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2018

NO	KECAMATAN	POKOK	POKOK KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN (Rp)			%	sisa	Realisasi tunggakan			Jumlah realisasi 18 + realisasi tungg. (Rp)
		KETETAPAN AWAL	(PERUBAHAN)	s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini			s/d bulan lalu	bulan ini	s/d bulan ini	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			Rp	Rp	Rp	
1	SIBULUE	843.335.183	844.171.849	770.367.888	73.803.961	844.171.849,00	100,00	0	5.584.928		5.584.928	849.756.777
2	PATIMPENG	278.928.279	282.458.824	280.969.739	1.489.085	282.458.824,00	100,00	0			0	282.458.824
3	LAMURU	477.100.274	475.073.698	475.141.215	-67.517	475.073.698,00	100,00	0	6.718.620		6.718.620	481.792.318
4	CENRANA	699.051.772	696.913.869	569.036.356	127.877.513	696.913.869,00	100,00	0	36.270.389		36.270.389	733.184.258
5	TONRA	307.199.709	307.787.707	307.800.381	-12.674	307.787.707,00	100,00	0			0	307.787.707
6	LIBURENG	542.736.693	543.433.905	543.433.905		543.433.905,00	100,00	0	373.838		373.838	543.807.743
7	AMALI	486.148.046	486.348.058	486.338.058	10.000	486.348.058,00	100,00	0	535.743	491.730	1.027.473	487.375.531
8	T. RIATTANG TIMUR	1.059.329.404	1.061.151.812	1.061.123.086	28.726	1.061.151.812,00	100,00	0			0	1.061.151.812
9	KAJUARA	441.862.509	442.534.934	442.534.934		442.534.934,00	100,00	0			0	442.534.934
10	BAREBBO	643.317.486	644.563.615	644.563.615		644.563.615,00	100,00	0			0	644.563.615
11	AWANGPONE	589.271.465	590.980.104	556.322.731	34.657.373	590.980.104,00	100,00	0			0	590.980.104
12	TELLU LIMPOE	175.688.986	175.849.186	175.849.186		175.849.186,00	100,00	0			0	175.849.186
13	PONRE	223.993.412	225.129.322	225.129.322		225.129.322,00	100,00	0			0	225.129.322
14	T. SIATTINGE	690.359.311	692.723.958	692.641.718	82.240	692.723.958,00	100,00	0			0	692.723.958
15	LAPPARIAJA	395.635.284	395.553.493	382.552.563,02	13.000.930	395.553.493,00	100,00	0	423.720		423.720	395.977.213
16	BONTOCANI	238.292.143	237.759.095	216.575.703	21.183.392	237.759.095,00	100,00	0			0	237.759.095
17	PALAKKA	469.000.895	469.364.392	454.564.743	14.799.649	469.364.392,00	100,00	0	8.404.958		8.404.958	477.769.350
18	MARE	589.764.546	592.056.024	560.421.819	31.634.205	592.056.024,00	100,00	0	43.370.247		43.370.247	635.426.271
19	SALOMEKKO	218.239.701	217.795.614	205.609.395	12.186.219	217.795.614,00	100,00	0			0	217.795.614
20	KAHU	907.293.745	909.685.109	864.715.789	44.162.520	908.878.309,00	99,91	-806.800			0	908.878.309
21	CINA	526.691.615	527.326.763	526.636.964	-4.689	526.632.275,00	99,87	-694.488	13.660.029		13.660.029	540.292.304
22	ULAWENG	426.614.908	427.431.947	392.430.644	34.390.026	426.820.670,00	99,86	-611.277			0	426.820.670
23	DUA BOCCOE	922.219.362	924.644.108	754.800.396	139.381.154	894.181.550,00	96,71	-30.462.558	560.692		560.692	894.742.242
24	AJANGALE	683.130.698	687.483.636	578.910.546	69.428.185	648.338.731,00	94,31	-39.144.905			0	648.338.731
25	T. RIATTANG	1.899.626.040	1.891.943.849	1.524.562.159	165.253.865	1.689.816.024,00	89,32	-202.127.825	83.521.916	12.795.983	96.317.899	1.786.133.923
26	BENGO	529.806.850	530.071.990	366.565.306	76.404.356	442.969.662,00	83,57	-87.102.328			0	442.969.662
27	T. RIATTANG BARAT	2.559.238.197	2.541.933.009	1.778.459.635	150.894.620	1.929.354.255,00	75,90	-612.578.754	99.859.124	17.319.842	117.178.966	2.046.533.221
	JUMLAH	17.823.876.513	17.822.169.870	15.838.057.796,02	1.010.583.139	16.848.640.935,00	94,54	-973.528.935	299.284.204	30.607.555	329.891.759	17.178.532.694,00

LAMPIRAN 6: Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2019

NO	KECAMATAN	POKOK	POKOK KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2019 (Rp)			%	sisa	Realisasi tunggakan			Jumlah realisasi 19 + realisasi tungg. (Rp)
		KETETAPAN AWAL Rp	(PERUBAHAN) Rp	s/d bulan lalu Rp	bulan ini Rp	s/d bulan ini Rp			s/d bulan lalu Rp	bulan ini Rp	s/d bulan ini Rp	
1	TELLU LIMPOE	180.168.226,00	182.016.346,00	182.016.346,00	-	182.016.346,00	100,00	-	-	-	-	182.016.346,00
2	BONTOCANI	236.275.299,00	238.007.955,00	238.007.955,00	-	238.007.955,00	100,00	-	-	-	-	238.007.955,00
3	LIBURENG	610.491.092,00	598.189.978,00	598.378.441,00	(188.463,00)	598.189.978,00	100,00	-	-	-	-	598.189.978,00
4	PALAKKA	478.846.840,00	479.048.718,00	479.048.718,00	-	479.048.718,00	100,00	-	-	-	-	479.048.718,00
5	LAMURU	476.627.707,00	475.614.055,00	454.294.600,00	21.319.455,00	475.614.055,00	100,00	-	-	-	-	475.614.055,00
6	KAJUARA	442.994.586,00	446.158.618,00	445.723.279,00	435.339,00	446.158.618,00	100,00	-	-	-	-	446.158.618,00
7	SALOMEKKO	218.476.440,00	219.841.673,00	187.408.704,00	32.432.969,00	219.841.673,00	100,00	-	-	-	-	219.841.673,00
8	PATIMPENG	281.760.234,00	282.654.446,00	281.582.387,00	1.072.059,00	282.654.446,00	100,00	-	-	-	-	282.654.446,00
9	PONRE	225.831.504,00	227.125.610,00	226.138.286,00	987.324,00	227.125.610,00	100,00	-	-	-	-	227.125.610,00
10	KAHU	906.892.520,00	908.865.907,00	877.094.063,00	31.771.844,00	908.865.907,00	100,00	-	636.000,00	-	636.000,00	909.501.907,00
11	AWANGPONE	604.298.982,00	596.317.631,00	595.331.361,00	986.270,00	596.317.631,00	100,00	-	-	-	-	596.317.631,00
12	LAPPARIAJA	397.741.503,00	397.612.955,00	377.864.397,00	19.748.558,00	397.612.955,00	100,00	-	-	-	-	397.612.955,00
13	T. RIATTANG TIMUR	1.068.567.136,00	1.059.010.084,00	1.058.575.537,00	434.547,00	1.059.010.084,00	100,00	-	-	-	-	1.059.010.084,00
14	TONRA	314.474.542,00	316.995.043,00	314.017.280,00	2.977.763,00	316.995.043,00	100,00	-	-	-	-	316.995.043,00
15	AMALI	549.419.192,00	539.720.146,00	539.556.684,00	163.462,00	539.720.146,00	100,00	-	-	-	-	539.720.146,00
16	BENGO	529.354.617,00	529.827.145,00	393.841.069,00	135.986.076,00	529.827.145,00	100,00	-	38.401.141,00	65,00	38.401.206,00	568.228.351,00
17	DUA BOCCOE	925.472.735,00	933.186.001,00	736.806.776,00	195.744.630,00	932.551.406,00	99,93	(634.595,00)	29.245.528,00	(26.914,00)	29.218.614,00	961.770.020,00
18	MARE	597.536.748,00	601.743.348,00	570.910.176,00	30.260.390,00	601.170.566,00	99,90	(572.782,00)	-	-	-	601.170.566,00
19	SIBULUE	842.792.510,00	844.678.770,00	842.883.315,00	627.460,00	843.510.775,00	99,86	(1.167.995,00)	-	-	-	843.510.775,00
20	CENRANA	693.647.111,00	696.780.042,00	612.699.414,00	82.786.176,00	695.485.590,00	99,81	(1.294.452,00)	27.439,00	-	27.439,00	695.513.029,00
21	ULAWENG	425.777.883,00	426.557.834,00	370.252.749,00	55.373.860,00	425.626.609,00	99,78	(931.225,00)	-	-	-	425.626.609,00
22	CINA	528.232.794,00	529.184.052,00	496.821.565,00	30.462.755,00	527.284.320,00	99,64	(1.899.732,00)	-	-	-	527.284.320,00
23	BAREBBO	659.963.307,00	661.283.106,00	658.570.093,00	1.087.202,00	659.657.295,00	99,75	(1.625.811,00)	-	-	-	659.657.295,00
24	T. SIATTINGE	701.364.885,00	700.953.899,00	673.917.533,00	487.398,00	674.404.931,00	96,21	(26.548.968,00)	-	-	-	674.404.931,00
25	AJANGALE	687.567.220,00	693.578.959,00	647.453.952,00	5.927.119,00	653.381.071,00	94,20	(40.197.888,00)	6.985.290,00	(28.224,00)	6.957.066,00	660.338.137,00
26	T. RIATTANG	1.978.721.035,00	1.969.601.907,00	1.624.503.636,00	77.057.106,00	1.701.560.742,00	86,39	(268.041.165,00)	36.635.037,00	1.165.102,00	37.800.139,00	1.739.360.881,00
27	T. RIATTANG BARA	2.569.686.165,00	2.552.960.157,00	1.773.639.644,00	161.727.324,66	1.935.366.968,66	75,81	(617.593.188,34)	145.456.970,00	11.317.233,00	156.774.203,00	2.092.141.171,66
	JUMLAH	18.132.982.813,00	18.107.514.385,00	16.257.337.960,00	889.668.623,66	17.147.006.583,66	94,70	(960.507.801,34)	257.387.405,00	12.427.262,00	269.814.667,00	17.416.821.250,66

LAMPIRAN 7: Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bone tahun 2020

NO	KECAMATAN	POKOK	POKOK KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2020 (Rp)			%	sisa	Realisasi tunggakan			Jumlah realisasi 2020 + realisasi tungg. (Rp)
		KETETAPAN AWAL Rp	(PERUBAHAN) Rp	s/d bulan lalu Rp	bulan ini Rp	s/d bulan ini Rp			s/d bulan lalu Rp	bulan ini Rp	s/d bulan ini Rp	
1	T. RIATTANG TIMUR	1.072.240.829	1.065.930.006	1.065.370.924	559.082	1.065.930.006	100,00	0			0	1.065.930.006
2	TELLU LIMPOE	185.002.176	184.383.286	184.361.836	21.450	184.383.286	100,00	0			0	184.383.286
3	BONTOCANI	237.899.975	239.658.804	239.658.804		239.658.804	100,00	0			0	239.658.804
4	PONRE	227.377.095	228.330.391	228.281.591	48.800	228.330.391	100,00	0			0	228.330.391
5	AMALI	533.108.122	537.698.279	537.698.279		537.698.279	100,00	0			0	537.698.279
6	SIBULUE	843.730.117	847.160.437	846.536.845	623.592	847.160.437	100,00	0	79.942		79.942	847.240.379
7	CENRANA	701.533.372	708.519.803	708.320.658	199.145	708.519.803	100,00	0	146.678		146.678	708.666.481
8	AJANGALE	729.322.448	719.014.775	718.877.886	136.889	719.014.775	100,00	0	301.372	14.800	316.172	719.330.947
9	PALAKKA	479.748.670	480.786.968	479.607.711	1.179.257	480.786.968	100,00	0			0	480.786.968
10	KAHU	907.906.254	907.771.283	907.701.568	69.715	907.771.283	100,00	0			0	907.771.283
11	TONRA	316.792.641	317.330.629	309.532.113	7.798.516	317.330.629	100,00	0			0	317.330.629
12	KAJUARA	444.873.404	444.794.256	444.236.104	442.168	444.678.272	99,97	-115.984			0	444.678.272
13	LAMURU	474.334.491	474.348.745	473.923.102		473.923.102	99,91	-425.643			0	473.923.102
14	PATIMPENG	281.740.231	283.302.474	282.962.539	7.643	282.970.182	99,88	-332.292			0	282.970.182
15	ULAWENG	427.237.841	428.671.259	427.472.940	548.644	428.021.584	99,85	-649.675	228.984		228.984	428.250.568
16	LIBURENG	593.165.786	593.638.333	592.665.654		592.665.654	99,84	-972.679			0	592.665.654
17	DUA BOCCOE	929.210.125	933.780.421	931.691.528	442.815	932.134.343	99,82	-1.646.078	2.424.268	76.146	2.500.414	934.634.757
18	SALOMEKKO	220.981.566	217.381.401	199.677.605	17.278.642	216.956.247	99,80	-425.154			0	216.956.247
19	LAPPARIAJA	397.180.406	399.091.906	393.381.015	4.489.506	397.870.521	99,69	-1.221.385			0	397.870.521
20	AWANGPONE	602.879.112	605.310.288	603.384.197	9.706	603.393.903	99,68	-1.916.385			0	603.393.903
21	BAREBBO	663.778.506	663.348.060	648.747.210	12.287.320	661.034.530	99,65	-2.313.530			0	661.034.530
22	CINA	532.374.819	538.839.538	490.428.996	37.511.202	527.940.198	97,98	-10.899.340	1.120.212		1.120.212	529.060.410
23	BENGO	529.231.757	526.588.404	474.754.827	35.669.196	510.424.023	96,93	-16.164.381	5.204.992		5.204.992	515.629.015
24	T. SIATTINGE	701.363.256	704.241.565	677.074.468	212.510	677.286.978	96,17	-26.954.587	36.177		36.177	677.323.155
25	T. RIATTANG BARAT	2.569.660.654	2.444.532.297	2.230.885.846	94.380.665	2.325.266.511	95,12	-119.265.786	228.145.408	19.729.935	247.875.343	2.573.141.854
26	MARE	605.165.597	608.466.004	528.259.900	42.507.336	570.767.236	93,80	-37.698.768	572.782		572.782	571.340.018
27	T.RIATTANG	1.959.479.972	1.937.526.317	1.664.027.175	81.690.724	1.745.717.899	90,10	-191.808.418	79.376.930	2.832.006	82.208.936	1.827.926.835
	JUMLAH	18.167.319.222	18.040.445.929	17.289.521.321	338.114.523	17.627.635.844	97,71	-412.810.085	317.637.745	22.652.887	340.290.632	17.967.926.476

Halaman 2

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	RETRIBUSI JASA USAHA	3,474,767,000.00	3,552,324,123.00	88.88	3,076,175,400.00	2,705,454,571.00	87.95	2,081,714,000.00	1,976,664,005.00	95.05
1	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	361,113,000.00	415,305,000.00	77.73	416,113,000.00	340,150,000.00	81.74	289,475,000.00	286,800,000.00	99.08
	A. SEWA RUMAH DINAS & BTC	171,113,000.00	107,800,000.00	58.86	171,113,000.00	93,700,000.00	54.76	86,000,000.00	77,650,000.00	90.29
	B. SEWA ALAT BERAT	140,000,000.00	154,400,000.00	101.00	160,000,000.00	161,450,000.00	100.91	160,000,000.00	165,150,000.00	103.22
	C. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	50,000,000.00	153,105,000.00	84.00	85,000,000.00	85,000,000.00	100.00	43,475,000.00	44,000,000.00	101.21
2	RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN	46,656,000.00	79,776,000.00	152.06	71,798,400.00	88,000,000.00	122.57	64,000,000.00	77,616,000.00	121.26
3	RET. JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN IKAN	1,253,050,000.00	1,256,095,000.00	88.23	114,157,500.00	1,004,733,100.00	880.13	706,525,000.00	762,008,000.00	107.85
	A. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	153,050,000.00	153,105,000.00	83.68	113,050,000.00	114,070,600.00	100.90	56,525,000.00	54,750,000.00	96.86
	B. DINAS PETERNAKAN	1,100,000,000.00	1,102,990,000.00	88.67	1,107,500.00	890,662,500.00	80.421	650,000,000.00	707,258,000.00	109
4	RETRIBUSI TERMINAL	200,000,000.00	133,180,000.00	63.67	200,000,000.00	125,635,000.00	62.82	104,000,000.00	105,000,000.00	100.96
5	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	540,748,000.00	629,291,000.00	107.00	45,514,000.00	29,550,000.00	64.93	35,514,000.00	45,308,000.00	127.58
	A. DINAS PERHUBUNGAN	5,514,000.00	5,140,000.00	86.14	5,514,000.00	5,250,000.00	95.21	5,514,000.00	5,845,000.00	106.00
	B. BADAN PENDAPATAN DAERAH	15,000,000.00	20,300,000.00	123.81	40,000,000.00	24,300,000.00	60.75	30,000,000.00	39,463,000.00	131.54
	C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	520,234,000.00	603,851,000.00	106.74	-	-	-	-	-	-
6	RET. JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN	150,000,000.00	115,765,000.00	69.67	150,000,000.00	113,800,000.00	75.87	100,000,000.00	93,605,000.00	93.61
7	RET. JASA USAHA PELAYANAN KEPSELABUHAN	7,200,000.00	5,450,000.00	63.89	7,200,000.00	6,750,000.00	93.75	7,200,000.00	6,750,000.00	93.75
8	RET. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	660,000,000.00	695,962,123.00	89.29	900,000,000.00	955,558,471.00	106.17	700,000,000.00	518,577,005.00	74.08
	A. DINAS KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN	800,000,000.00	764,351,000.00	84.96	800,000,000.00	838,209,000.00	104.78	650,000,000.00	444,095,000.00	68.32
	B. KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA	90,000,000.00	131,611,123.00	127.77	100,000,000.00	117,347,471.00	117.35	50,000,000.00	74,482,005.00	148.96
10	RET. JS. USH. PENJUALAN PROD. USH DAERAH	26,000,000.00	21,500,000.00	82.69	65,000,000.00	41,200,000.00	63.38	75,000,000.00	81,800,000.00	109.07
III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	4,606,000,000.00	4,912,002,200.00	96.94	4,756,000,000.00	4,784,522,586.00	100.60	4,006,000,000.00	4,067,597,563.00	101.54
1	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	4,600,000,000.00	4,903,965,200.00	96.89	4,750,000,000.00	4,779,922,586.00	100.63	4,000,000,000.00	4,061,137,563.00	101.53
2	RET. IZIN GANGGUAN / KERAMAIAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. RET. IZIN GANGGUAN / KERAMAIAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RET. IZIN TRAYEK	6,000,000.00	7,690,000.00	128.17	6,000,000.00	4,600,000.00	76.67	6,000,000.00	6,360,000.00	106.00
4	RET. IZIN USAHA PERIKANAN	-	347,000.00	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH	7.092.406.600,00	7.055.937.640,00	100,00	8.558.628.147,00	8.558.628.147,00	100,00	10.683.630.905,00	10.647.161.905,00	99,66
1	BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN DAERAH	7.055.937.600,00	7.055.937.640,00	100,00	8.558.628.147,00	8.558.628.147,00	100,00	36.469.000,00	-	-
2	LABA PERUSAHAAN DAERAH	36.469.000,00	-		-			10.647.161.905,00	10.647.161.905,00	100,00
	D. LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	128.288.064.300,00	122.289.511.159,97	95,32	128.633.197.753,00	147.852.176.586,82	115,76	168.745.698.357,00	183.891.030.686,41	108,98
1	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YG TIDAK DIPISAHKAN	1.452.830.800,00	844.416.232,00	44,36	567.915.000,00	459.414.299,00	80,89	540.573.844,00	411.210.740,00	76,07
	A. PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	262.830.800,00	-		67.915.000,00	-	-	67.915.000,00	-	-
	B. PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA	-	-		-	-	-	0	0	-
	C. KOMPENSASI PENGGUNAAN TEMPAT	-	-		-	-	-	-	-	-
	D. PENJUALAN HASIL PERIKANAN	-	-		-	-	-	-	-	-
	E. PENJUALAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK DIPAKAI	-	-		-	-	-	-	-	-
	F. PENJUALAN HASIL PERTAMBANGAN	-	-		-	-	-	-	-	-
	G. PENJUALAN HASIL SITAAN	-	-		-	-	-	-	-	-
	H. PEMBAYARAN RUKO PASAR LAM EKS PASAR SENTRAL	-	12.000.000,00	53,14	-	-	-	-	-	-
	I. PENJUALAN LOTS PASAR / RUKO (PASAR PALAKKA)	1.190.000.000,00	632.416.232,00	53,14	500.000.000,00	429.414.299,00	85,88	472.658.844,00	411.210.740,00	87,00
2	JASA GIRO	6.000.000.000,00	6.449.551.380,34	107,49	8.223.840.853,00	8.894.873.581,01	108,16	8.079.050.000,00	7.030.613.856,93	87,02
3	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	700.000.000,00	933.671.980,33	120,79	300.000.000,00	356.487.886,48	118,83	475.000.000,00	313.253.420,50	65,95
4	FASILITASI SOSIAL DAN FASILITASI UMUM	-	-		-	-	-	-	-	-
5	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH (PEND. BLUD. RSUD, BG. HSL. KAPAL, DANA KAPITASI JKN)	119.995.633.500,00	114.189.181.567,30	95,11	113.895.988.500,00	138.076.553.163,00	121,23	158.995.221.113,00	175.540.780.711,98	110,41
6	SUMBANGAN PIHAK KE TIGA	139.600.000,00	72.690.000,00	52,07	139.600.000,00	117.100.000,00	83,88	64.800.000,00	69.920.000,00	107,90
7	PEN. GANTI RUGI ATS. KEKAYAAN DAERAH/ PENDPTN DENDA/TUNGKN. PAJAK T. GAL. GOL. C	-	-		480.853.400,00	-	-	655.853.400,00	595.171.957,00	90,75
8	DANA BOS	-	-		89.786.200.000,00	-	-	-	-	-

Halaman 4

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	DANA PERIMBANGAN	1,568,604,640,867.00	1,543,061,518,494.00	98.40	1,634,922,733,000.00	-	-	1,472,798,260,499.00	1,445,278,185,340.00	98.13
	A. BAGI HASIL PAJAK	23,957,422,000.00	17,511,213,514.00	73.09	15,786,686,000.00	10,595,497,900.00	67.12	17,251,901,000.00	18,754,681,283.00	108.71
1	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	11,400,829,000.00	9,629,332,666.00	84.46	8,827,653,000.00	6,420,078,100.00	72.73	6,703,182,000.00	5,837,494,697.00	87.09
2	PPh Psd.25 & Psd.29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DLM NEG. & PPh Psd 21	12,556,593,000.00	7,881,880,848.00	62.77	6,959,033,000.00	4,175,419,800.00	60.00	10,548,719,000.00	12,917,186,586.00	122.45
	B. BAGI HASIL, BUKAN PAJAK / SDA	6,430,710,867.00	5,017,092,963.00	84.52	8,500,454,000.00	66,584,018,054.00	783.30	6,447,657,000.00	4,712,407,161.00	73.09
1	PENERIMAAN & IURAN EKSPLOITASI / IURAN EKSPLOITASI ROYALTI									
2	IURAN HAK ATAS PENGUSAHAAN HUTAN									
3	BAGI HASIL DARI PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN									
4	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)									
5	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP / LANDRENT									
6	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS	1,232,656,000.00	862,866,100.00	70.00	2,737,840,000.00	1,505,812,000.00	55.00	292,491,000.00	289,289,456.00	98.91
7	BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU	848,353,867.00	819,711,000.00	96.62	956,579,000.00	956,579,000.00	100.00	789,453,000.00	749,278,368.00	94.91
8	BAGI HASIL MINERAL DAN BATTUBARA	3,384,028,000.00	3,028,962,763.00	89.51	3,799,208,000.00	3,517,476,854.00	92.58	3,911,781,000.00	2,174,950,150.00	55.60
9	BAGI HASIL SDA KEHUTANAN	22,645,000.00	22,645,000.00	100.00	23,324,000.00	13,994,400.00	60.00	35,571,000.00	710,612,898.00	1,997.73
10	BAGI HASIL DARI SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN	943,027,000.00	282,908,100.00	30.00	983,503,000.00	590,155,800.00	60.01	1,418,361,000.00	788,276,289.00	55.58
	C. DANA ALOKASI UMUM	1,070,426,493,000.00	1,070,426,493,000.00	100.00	1,116,830,949,000.00	469,382,186,930.00	42.03	1,015,212,018,000.00	1,000,527,318,000.00	98.55
1	DANA ALOKASI UMUM	1,070,426,493,000.00	1,070,426,493,000.00	100.00	1,116,830,949,000.00	469,382,186,930.00	42.03	1,015,212,018,000.00	1,000,527,318,000.00	98.55
	D. DANA ALOKASI KHUSUS	467,790,015,000.00	450,106,719,017.00	96.22	493,804,644,000.00	196,894,976.00	0.04	433,886,684,499.00	421,283,778,896.00	97.10
1	DANA ALOKASI KHUSUS NON REBOISASI									
	D. DANA ALOKASI KHUSUS	183,736,000,000.00	178,423,666,465.00	97.11	203,229,858.00	196,894,979,100.00	96.883	146,035,350,000.00	145,517,819,857.00	99.65
1	DANA ALOKASI KHUSUS	183,736,000,000.00	178,423,666,465.00	97.11	203,229,858.00	196,894,979,100.00	96.883	146,035,350,000.00	145,517,819,857.00	99.65

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>E. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</i>	284,054,015,000.00	271,683,052,552.00	95.64	290,574,786,000.00	272,847,207,830.00	93.90	287,851,334,499.00	275,765,959,039.00	95.80
1	TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	222,801,305,000.00	213,581,551,590.00	95.86	210,786,727,000.00	198,942,406,640.00	94.38	198,594,173,000.00	198,594,173,000.00	100.00
2	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD	1,682,000,000.00	498,600,000.00	30.00						
3	BANTUAN OP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	14,815,800,000.00	14,145,600,000.00	95.48	13,787,400,000.00	12,093,600,000.00	87.71	12,886,200,000.00	10,000,740,000.00	77.61
4	BANTUAN OP KESEHATAN	25,311,733,000.00	30,532,952,962.00	120.63	38,111,324,000.00	41,499,071,780.00	114.92	52,514,845,499.00	48,984,431,183.00	93.28
5	AKREDITASI RUMAH SAKIT								0	-
6	AKREDITASI PUSKESMAS	3,750,000,000.00	-		2,618,650,000.00	-	-	2,028,674,000.00	-	-
7	JAMINAN PERSALINAN	2,610,242,000.00	-		5,128,000,000.00	-	-	1,734,066,000.00	-	-
8	BANTUAN OP KELUARGA BERENCANA	7,469,790,000.00	7,423,982,000.00	99.39	7,902,690,000.00	7,398,398,750.00	93.59	8,104,204,000.00	7,902,528,752.00	97.51
9	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2,068,757,000.00	1,935,978,000.00	93.58	2,275,632,000.00	2,284,528,800.00	99.51	2,883,780,000.00	2,857,687,854.00	99.03
10	TUNJANGAN KHUSUS GURU	3,564,388,000.00	3,564,388,000.00	100.00	4,029,184,000.00	2,708,867,680.00	67.23	188,022,000.00	188,022,000.00	100.00
III	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	726,542,419,000.00	672,238,971,502.00	91.25	598,743,296,400.00	608,543,623,432.22	101.80	637,407,434,172.00	650,357,524,388.98	102.03
	<i>A. PENDAPATAN HIBAH</i>	1,979,415,000.00			101,397,018,400.00	108,725,001,724.00	105.25	100,809,488,000.00	111,197,545,150.00	110.30
	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	1,979,415,000.00			11,610,818,400.00	8,585,401,724.00	56.55	11,023,288,000.00	4,834,975,150.00	42.05
	Bantuan Pemerintah Pusat	1,979,415,000.00			11,610,818,400.00	-	-	11,023,288,000.00	4,834,975,150.00	42.05
	- Dana Hibah (POMP)	1,979,415,000.00							0	
1	PEMERINTAH									
	<i>A. BAGI HASIL PAJAK PROPINSI & PEMERINTAH LAINNYA</i>	74,983,000,000.00	63,191,084,719.00	84.27	79,083,000,000.00	84,886,090,708.22	108.71	78,429,535,172.00	81,975,704,795.98	104.52
1	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	14,000,000,000.00	12,107,186,519.00	86.48	16,000,000,000.00	19,112,721,211.00	119.45	16,000,000,000.00	19,105,354,857.00	119.41
2	BAGI HASIL DARI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	13,000,000,000.00	8,230,584,462.00	63.31	13,000,000,000.00	13,680,830,219.00	105.24	13,000,000,000.00	14,928,428,763.00	114.83
3	BEA BALIK NAMA KEND. DIATAS AIR									
4	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KEND. BERMOTOR	21,000,000,000.00	16,805,067,754.00	80.02	21,000,000,000.00	22,374,220,190.00	108.54	21,000,000,000.00	17,279,134,681.00	82.28
5	PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN	83,000,000.00	43,550,099.00	52.47	83,000,000.00	55,197,887.00	66.50	83,000,000.00	65,049,566.00	78.37
	AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN				83,000,000.00	-	-	83,000,000.00	65,049,566.00	78.37
6	PAJAK ROKOK	26,900,000,000.00	26,004,725,885.00	96.67	28,000,000,000.00	29,663,121,201.22	105.94	28,346,535,172.00	30,597,736,928.98	107.94
7	RETRIBUSI PELAYANAN TERA									

Halaman 6

NO.	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>B. DANA PENYESUAIAN</i>	621.636.004.000,00	589.587.876.790,00	94,55	9.486.726.000,00	9.486.726.000,00	100,00	9.486.726.000,00	9.486.726.000,00	100,00
1	DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN PROFESI GURU	222.801.305.000,00	213.581.551.590,00		210.786.727.000,00	198.942.406.640,00	94,38	198.594.173.000,00	198.594.173.000,00	100,00
2	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS GURU	1.662.000.000,00	498.600.000,00							
3	DANA BOS	89.786.200.000,00	68.887.440.000,00	76,72	89.786.200.000,00	100.159.600,00	0,11	89.786.200.000,00	106.562.570.000,00	118,68
4	DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR & PRASARANA DAERAH	-	-							
5	DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL & PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH/INSENTI	-	-							
6	DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN/DAERAH	-	-							
7	DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL	-	-							
8	DANA DEGA	289.886.499.000,00	289.120.285.200,00	99,74				333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	100,00
9	DAN PROYEK PEMERINTAH DAERAH & DESENTRALISASI TAHUN 2018									
10	DANA INSENTIF DAERAH	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00	9.486.726.000,00	9.486.726.000,00	100,00	41.710.557.000,00	41.710.557.000,00	100,00
	<i>C. BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI</i>	27.944.000.000,00	19.458.000.000,00	69,63	72.444.000.000,00	71.113.253.000,00	98,16	82.670.000.000,00	81.685.861.443,00	98,81
1	PENYISIHAN PBB U/ PEMERINTAH DESA									
2	BANTUAN DARI PROPINSI	2.000.000.000,00			46.500.000.000,00	45.169.253.000,00	97,14	44.600.000.000,00	43.815.861.443,00	97,79
3	BANTUAN KEUANGAN PENDIDIKAN & KESEHATAN GRATIS	25.944.000.000,00	19.458.000.000,00	75,00	25.944.000.000,00	25.944.000.000,00	100,00	38.070.000.000,00	38.070.000.000,00	100,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.494.619.891.646,00	2.415.610.221.678,97	96,71	2.536.979.745.701,43	2.542.895.998.878,65	100,23	2.360.768.609.699,00	2.387.091.199.482,39	100,27

LAMPIRAN 9: Wawancara Langsung Kepada BAPENDA Kabupaten Bone

Substansi	Objek	Jawaban
<p>Bagaimana proses penentuan target pajak?</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Penentuan tarif nya masih mengacu pada rangkaian KPP Pratama yang diproses di sistem. Itu yang diungkapkan setiap tahun. Jadi masa pajak nya januari sampai desember</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE <p>Untuk penentuan target pajak kita melihat bagaimana pencapaian target pajak tahun sebelumnya, kita juga melihat bagaimana prediksi tambahan obyek pajak di tahun yang berjalan (Tahun depan). Kita melihat bagaimana basis data wajib pajak</p>

		kemudian bagaimana realisasi pajak tahun lalu, kemudian Bagaimana prediksi tahun depan (Kira kira berapa wajib pajak yang bisa kita data)
Apakah ada indikator tertentu dalam proses penentuan target pajak?	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Dalam penentuan target dasarnya dari NJOP (nilai jual objek pajak) dengan jumlah objek pajak. Di Kabupaten Bone jumlah objek pajak PBB dihitung sekitar 600.000 Objek Pajak</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE <p>Realisasi tahun lalu, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat PDRB (disumbang dari sektor mana). Pertumbuhan ekonomi indikatornya paling tidak itu pajak separuh</p>

		<p>dari pertumbuhan ekonomi. Misal kita lihat pertumbuhan ekonominya 5% kita usahakan dibawahnya karena pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB. Sumbangan terbesar dari PDRB yaitu dari sektor pertanian. Sedangkan pajak hanya sedikit dari pertanian. Jadi PDRB indikatornya itu kita mengambil pertumbuhan ekonomi</p>
<p>Siapakah yang menentukan target pajak?</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Untuk penentuan target pajak ditentukan di bagian layanan PBB-P2. Ditetapkan di sistem</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE

		Target pajak ditetapkan dalam APBD Kab. Bone. Dibahas bersama dengan pihak pemerintah daerah bersama DPRD. Jadi BAPENDA pada Pendapatan Daerah mengajukan target pajak kedalam rancangan UUD. Nah ini dibahas di pembahasan APBD bersama pihak legislatif.
Apakah realisasi dapat mencapai target?	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE Realisasi bisa mencapai target walaupun ada beberapa jenis yang tidak mencapai target. Tapi secara keseluruhan Pajak Daerah Kab. Bone selalu tercapai.
Apa hal-hal yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bone dalam melakukan penagihan PBB-P2?	Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah:	Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si Yang melakukan penagihan pajak adalah kolektor (Dari desa). Salah satu cara yang

	Andi Nur Ani, SE	<p>dilakukan adalah melakukan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Bupati yang ditargetkan untuk Camat dan Desa dan diharapkan untuk melakukan penagihan. Untuk BAPENDA sendiri tidak terjun langsung melainkan hanya menjadi koordinator (bagian pengarahan)</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Andi Nur Ani, SE <p>Hal hal yang dilakukan oleh BAPENDA dalam menagih yaitu dengan memberikan SPPT ke wajib pajak kemudian wajib pajak membayar. PBB-P2 ditagih oleh kolektor di tingkat desa/ kelurahan karena SPPT PBB-P2 dicetak di PPL kemudian SPPT setelah dicetak secara massal diberikan ke camat. Camat menyalurkan ke Kepala</p>
--	------------------	---

		Desa. Kepala Desa kemudian menyampaikan ke WP melalui kolektor
Bagaimana mekanisme pembayaran PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Bone?	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si Debt kolektor menagih ke wajib pajak. Debt kolektor kemudian menyetor ke BANK SULSEL setiap sebulan sekali atau setiap punya kesempatan <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE Mekanisme pembayaran melalui kolektor (kolektor menagih pajak kepada WP. Kolektor kemudian membuat daftar secara keseluruhan pembayarannya dan distor ke bapenda. Kemudian bapenda menyetor ke kas daerah.

<p>Bagaimana dengan wajib pajak yang tidak membayar pajak? Apa saja hal yang dilakukan oleh bagian PBB-P2?</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Untuk saat ini belum ada sanksi yang diberikan. Namun apabila ada wajib pajak yang ingin mengurus berkas wajib dicek apakah sebelumnya ada tunggakan atau tidak. Apabila setelah dicek wajib pajak memiliki tunggakan maka wajib pajak diharuskan untuk melunasi tunggakan tersebut terlebih dahulu sebelum menyelesaikan proses pengurusan berkasnya dengan bunga sebesar 2% per bulan</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE <p>Dikenakan denda. Ketika ada wajib pajak yg ingin melakukan pembyaran tunggakan maka akan dicetak surat setoran setoran</p>
--	--	--

		pembayaran yang sudah mencamtumkan seberapa besar denda yang perlu dibayar
Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB-P2?	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Masih ada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Selain itu, wilayah Kabupaten Bone yang luas menyulitkan pendataan dalam penambahan obyek pajak</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE <p>Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, kemudian kadang ada wajib pajak yang tidak berdomisili di kabupaten bone. Kdg masih ada objek dan subjek pajak yang tidak diketahui. Kurang lebih 600ribu wajib pajak di Kab. Bone diantaranya itu</p>

		<p>masih ada terkadang wp yang tidak diketahui siapa pemilik dan mana objeknya. Terkadang sudah ada yang pindah tangan, sudah dilakukan penjualan dll dan tidak dilaporkan.</p>
<p>Apa saja srategi yang dilakukan unuk meningkatkan realisasi PBB-P2?</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB: Muh. Asdar, S.Sos., M.Si</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah: Andi Nur Ani, SE</p>	<p>Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 & BPHTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muh. Asdar, S.Sos., M.Si <p>Melakukan sosialisasi ke desa desa, Memberikan pengarahan atau informasi dan memantau perkembangan penerimaan PBB-P2. Untuk mengatasi kendala terkait masalah luas wilayah yaitu dengan melakukan pendataan secara bertahap. Misal dalam setahun hanya bisa melakukan pendataan Ke 10 desa</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Nur Ani, SE

		Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian melakukan rapat evaluasi dengan mengikutsertakan camat
--	--	---